

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Juni 2025, perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan deflasi sebesar 0,12% (mtm), tidak sedalam bulan sebelumnya yang juga tercatat deflasi sebesar 0,44% (mtm). Secara tahunan, inflasi Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 1,32% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 1,73% (yoy). Deflasi juga terjadi pada 3 Kabupaten/Kota IHK di Kepri, yaitu Batam, Tanjungpinang dan Karimun yang masing-masingnya tercatat deflasi 0,06% (mtm), 0,13% (mtm) dan 0,71% (mtm). Dengan demikian, secara tahunan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan inflasi sebesar 1,32% (yoy) atau secara tahun kalender tercatat sebesar 0,70% (ytd).

Adapun komoditas utama penyebab Deflasi Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Juni 2025 terjadi karena didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang mengalami deflasi 0,55% (mtm) dan berkontribusi -0,15% terhadap realisasi inflasi. Deflasi kelompok ini utamanya disebabkan oleh penurunan harga komoditas pangan terutama cabai merah, daging ayam ras, bayam, dan udang basah. Penurunan ini didorong oleh pasokan di daerah sentra yang tetap terjaga pada bulan Juni 2025. Selain itu, Kelompok Transportasi turut memberikan andil deflasi sebesar 0,03% (mtm) terutama didorong oleh penurunan tarif angkutan laut sejalan dengan stimulus diskon tiket kapal yang berlaku pada bulan Juni - Juli 2025. Di sisi lain, deflasi yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan harga angkutan udara sejalan dengan tingginya permintaan di periode long weekend dan libur sekolah yang terjadi pada Juni 2025. Selain itu, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya juga turut menyumbang inflasi dengan andil 0,03% sejalan dengan masih tingginya harga emas perhiasan.

Dengan perkembangan tersebut, pada bulan Juni 2025 perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kepulauan Riau mencatat deflasi sebesar 0,12 (mtm), deflasi terjadi karena penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,23 pada Mei 2025 menjadi 108,10 pada Juni 2025. Sedangkan tingkat inflasi sebesar 0,70% (ytd).

Triwulan II menunjukkan adanya perkembangan harga berbagai komoditas pada Juni 2025 secara umum menunjukkan adanya penurunan. Berdasarkan hasil pemantauan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau di 3 Kabupaten/Kota, pada Juni 2025 terjadi inflasi y-on-y sebesar 1,32%, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,69 pada Juni 2024 menjadi 108,10 pada Juni 2025. Tingkat deflasi m-to-m sebesar 0,12% dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 0,70%.

**Tabel 1. IHK dan Tingkat Inflasi *Month to Month* (mtm), *Year to Date* (ytd), dan *Year on Year* (yoy) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Juni 2025**

Kelompok Pengeluaran	IHK Juni 2024	IHK Desember 2024	IHK Juni 2025	Tingkat Inflasi m-to-m Juni 2025 <sup>1</sup> (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Juni 2025 <sup>2</sup> (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Juni 2025 <sup>3</sup> (%)	Andil Inflasi m-to-m Juni 2025 (%)	Andil Inflasi y-on-y Juni 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum	106,69	107,35	108,10	-0,12	0,70	1,32	-0,12	1,32
Makanan, Minuman, dan Tembakau	110,36	110,31	109,83	-0,55	-0,44	-0,48	-0,15	-0,14
Pakaian dan Alas Kaki	106,15	106,32	106,59	0,41	0,25	0,41	0,02	0,02
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	103,00	105,23	105,93	0,09	0,67	2,84	0,01	0,45
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	101,79	101,60	101,76	-0,12	0,16	-0,03	~0	~0
Kesehatan	103,82	104,11	104,93	0,08	0,79	1,07	~0	0,03
Transportasi	111,56	112,86	112,95	-0,25	0,08	1,25	-0,03	0,17
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,03	99,97	99,91	~0	-0,06	-0,12	~0	-0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	101,28	102,08	101,83	~0	-0,24	0,54	~0	0,01
Pendidikan	104,19	102,23	102,27	0,03	0,04	-1,84	~0	-0,13
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	102,70	103,02	105,22	0,01	2,14	2,45	~0	0,23
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	111,06	114,87	123,34	0,51	7,37	11,06	0,03	0,69

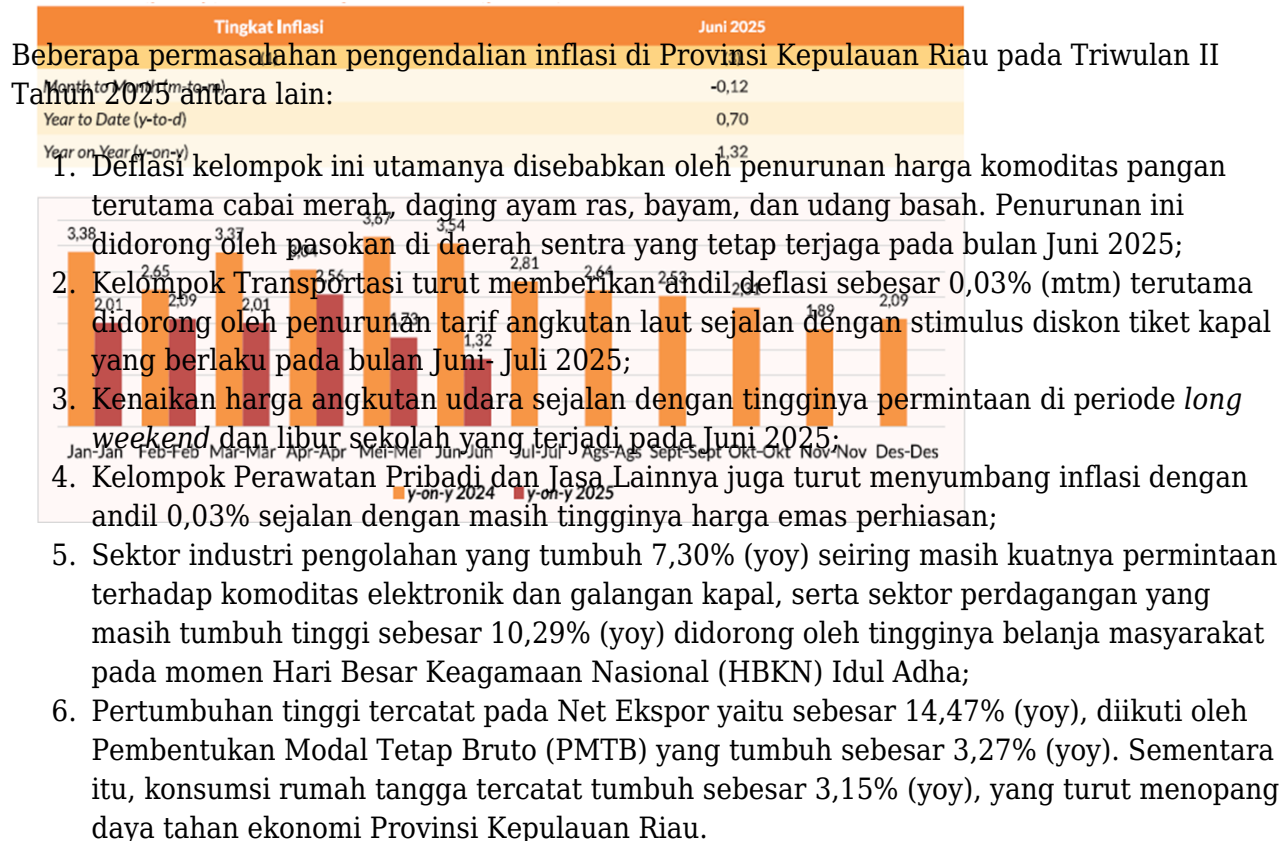
Catatan: <sup>1</sup>Persentase perubahan IHK Juni 2025 terhadap IHK Mei 2025,  
<sup>2</sup>Persentase perubahan IHK Juni 2025 terhadap IHK Desember 2024,  
<sup>3</sup>Persentase perubahan IHK Juni 2025 terhadap IHK Juni 2024  
~0: Data sangat kecil/mendekati 0

**Tabel 2. Tingkat Inflasi *Month to Month* (mtm), *Year to Date* (ytd), dan *Year on Year* (yoy) Provinsi Kepulauan Riau, Juni 2025 (Persen)**

Inflasi Kepulauan Riau pada triwulan II tahun 2025 menunjukkan upaya pengendalian inflasi yang tetap terjaga tersebut sejalan dengan konsistensi kebijakan moneter serta sinergi kuat pengendalian inflasi baik di Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) maupun di Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

## 2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Inflasi Provinsi Kepulauan Riau, bulan April sampai dengan bulan Juni 2025 tetap terkendali dalam rentang sasaran, pada April 2025 inflasi sebesar 2,56% (yoy), sedangkan inflasi bulan Juni 2025 sebesar 1,32% (yoy). Sasaran inflasi nasional diperkirakan masih terkendali pada sekitar batas atas kisaran target  $2,5 \pm 1\%$ .



## 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan II tahun 2025. Beberapa kegiatan di triwulan II ini terkait pengendalian inflasi sebagai berikut:

1. Terkendalinya inflasi di Provinsi Kepulauan Riau tidak terlepas dari kuatnya koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
2. Pemerintah Kepulauan Riau secara konsisten bersinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif);
3. Penandatanganan kesepakatan Bersama dan *Capacity Building* Kerjasama Antar Daerah (KAD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Lampung, dan Maluku Utara;
4. Penyediaan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali;
5. Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara rutin di berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau;
6. Pelaksanaan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Bintan dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Idul Adha;
7. *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kabupaten Karimun dalam rangka persiapan Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Idul Adha;
8. Rapat koordinasi pengendalian inflasi di Kota Tanjungpinang;
9. Rapat koordinasi teknis dalam rangka pelaksanaan Pasar Murah Kota Batam;
10. Dukungan digitalisasi data melalui perpanjangan penyediaan *Dashboard* Data Pangan Kota Tanjungpinang.

#### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa evaluasi terkait kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu :

1. Penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi per Juli 2025;
2. Penyesuaian tarif listrik di Kota Batam;
3. Berlanjutnya kenaikan tarif angkutan udara di tengah momen libur sekolah;
4. Permintaan terhadap komoditas pangan strategis, khususnya daging sapi di periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Idul Adha yang jatuh pada Juni 2025 dan meningkatnya *imported inflation* sejalan dengan kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat;
5. Penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan masih lancarnya pasokan pangan dari daerah sentra berpotensi menahan tekanan inflasi;
6. Kegiatan operasi pasar Provinsi Kepulauan Riau akan terus diintensifkan menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Idul Adha di seluruh Kabupaten/Kota, disertai dengan koordinasi melalui *High Level Meeting* (HLM) dan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);
7. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau juga terus memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengendalian inflasi melalui Kerja sama Antar Daerah (KAD);
8. Pengawasan untuk memastikan pelaku usaha tidak menaikkan harga secara tidak wajar dan menimbun barang dalam rangka spekulasi;
9. Melakukan komunikasi efektif dengan mengelola ekspektasi inflasi masyarakat untuk itu agar dapat menyampaikan melalui media cetak dan media elektronik.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merekomendasikan beberapa kebijakan pengendalian inflasi kepada Pemerintah Pusat sebagai berikut:

1. Musim panen untuk beberapa hortikultura;
2. Berlanjutnya diskon tarif angkutan laut pada Juli 2025;
3. Normalisasi permintaan terhadap komoditas pangan pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Idul Adha;
4. Kedepannya Pemerintah Kepulauan Riau bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus memperkuat sinergi untuk stabilitas inflasi di Provinsi Kepulauan Riau;
5. Pemerintah Kepulauan Riau bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan memperkuat pengendalian inflasi antara lain dalam hal peningkatan produksi pangan, penguatan kerjasama antar daerah dan pelaksanaan pasar murah;
6. Terkendalnya inflasi mencerminkan efektivitas kebijakan moneter yang konsisten serta sinergi kuat antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).